

Pemanfaatan Media Online Dalam Membangun Komunikasi Politik Di Nusa Tenggara Barat

¹Supriadi, ²Supardi

IAI Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Email: supriadigocik@gmail.com supardicupeng728@gmail.com

Abstract

In the digital era, media has become a trusted medium for broadcasting, but it often deviates from the regulations established by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). However, both electronic and print media are frequently used by elites as campaign tools during presidential and general elections. These elites use the media to attract supporters or public support. They also use the media as political material, used by elites who provide cartels or opportunistically to secure seats in presidential or general elections. The development of information technology has driven transformations in various aspects of life, including the realm of political communication. Online media has now become a primary instrument for conveying political messages, both by political actors, parties, and the general public. This study aims to analyze how online media is utilized as a political communication tool, as well as its impact on public participation and opinion formation. The method used in this research is a qualitative study with a descriptive-analytical approach through a literature review and case studies on several social media platforms. The results show that online media enables two-way interaction between political actors and the public, accelerates the dissemination of information, and opens up broader spaces for participation. However, the use of online media also presents challenges, such as disinformation and opinion polarization. Therefore, digital literacy and strong political communication ethics are needed so that online media can be utilized positively in modern democracy.

Keywords: *Media, Online, Communication, Politics*

Abstrak

Diera digital media menjadi salah satu penyiaran yang cukup dipercaya oleh masyarakat, akan tetapi media sering juga keluar dari koridor atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun media elektronik maupun cetak sering sekali digunakan oleh para elit sebagai alat kampanye pada momen pilpres atau pilek. Para elit menggunakan media sebagai alat untuk menarik simpatisan atau sura masyarakat, media juga tidak mau terlepas sebagai bahan politik yang digunakan oleh orang-orang elit yang memberi kartel atau oportunistik pada saat mendapatkan kursi di pilpres atau pilek. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah komunikasi politik. Media online kini menjadi salah satu instrumen utama dalam menyampaikan pesan-pesan politik, baik oleh aktor politik, partai, maupun masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media online dimanfaatkan sebagai alat komunikasi politik, serta dampaknya terhadap partisipasi publik dan pembentukan opini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah literatur dan studi kasus pada beberapa platform media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media online memungkinkan interaksi dua arah antara pelaku politik dan masyarakat, mempercepat penyebaran informasi, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Namun, pemanfaatan media online juga menghadirkan tantangan, seperti disinformasi dan polarisasi opini. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital dan etika komunikasi politik yang kuat agar media online dapat dimanfaatkan secara positif dalam demokrasi modern.

Kata Kunci: *Media, Online, Komunikasi, Politik*

Pendahuluan

Konsep virtualitas, dalam konteks politik tidak hanya dipahami sebagai sifat kenyamanan yang tercipta akibat mekanisme jejaringan komputer (*cyberspace*), akan tetapi melingkupi konsep maya dalam pengertian yang lebih luas, yang tercipta di dalam ruang-ruang lebih luas, yang mencakup di dalamnya ruang-ruang televisi, film, video dan media komunikasi publik lainnya.¹ Dunia virtual, sebagaimana dikatakan oleh Michel Hardt dan Anthony Negri, adalah dunia yang melampaui ukuran, dalam pengertian bahwa tidak ada mekanisme yang dapat mengukur kekuatan nilai, atau batas, yang hanya mungkin dilakukan di dalam dunia yang mempunyai batas-batas. Di dalam dunia virtual tidak ada lagi sekala yang tepat dan dapat digunakan untuk mengukur nilai, kekuatan, atau batas tersebut, disebabkan semuanya bergerak dan berpindah ke arah konstitusi nilai-nilai yang melampaui ukuran. Problem pengukuran (kekuatan, nilai, batas) di dalam dunia virtualitas disebabkan dunia tersebut dibangun oleh sebuah tempat yang berciri ketak-bertempat-an (*non-place*). Tidak ada yang disebut tempat dalam pengertian yang sebenarnya dalam dunia virtual, yang mengenal batas-batas teritorial. Dengan demikian, salah satu pengertian dunia virtualitas adalah seperangkat kekuatan atau bertindak (*engada*, *mencintai*, *mentransformasikan*, *mencipta*) yang berada di dalam ketidakberhinggaan, artinya dalam ketidakberbatasan dan ketidakterbatasan.²

Komunikasi politik merupakan kajian sangat menarik. Alasannya adalah karena kajian ini memiliki kajian praktis yang berguna bagi para pelaku dan partisipan politik, baik kalangan elit politik maupun gerakan rakyat. Siapa saja yang melihat bahwa dunia tidak dapat dilepaskan dari reaksi kekuasaan, maka ia akan meyakini bahwa relasi kekuasaan tidak akan dapat dilepaskan dari proses komunikasi.³ Komunikasi politik merupakan persilangan antara ilmu politik dan ilmu komunikasi. Pembahasan ini berfokus pada proses penyampaian pesan melalui media yang juga bersifat politis.⁴ Sama seperti pesan, media dan saluran politik formal seperti negara dan lembaga-lembaga politik lainnya juga memiliki kekuatan politik lainnya. Secara garis besar, politik berkenaan dengan gejala kekuasaan, kewenangan pengaturan, ketaatan dan ketertiban. Jika kita sederhanakan lagi, sama halnya dengan kewenangan dan pengaturan, kekuasaan (*power*) dan pengaruh (*influence*) merupakan suatu keseimbangan dan konsekuensi logis. Sedangkan ketaatan dan ketertiban adalah akibat dan tujuan. Dengan demikian, politik berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), dan ketaatan atau ketertiban (*order*).⁵

Dalam kehidupan kita sehari-hari istilah politik sudah tidak begitu asing lagi terdengar di telinga, karena segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok atau kekuasaan, sering kali di atas namakan kepentingan kelompok tersebut. Dalam mekanisme pengaturan tersebut

¹ Jom Visip Volume, "Key Word : Communication Planning, Socialization, Smart City" 4, no. 2 (2017): 1–13, <https://www.neliti.com/publications/199308/perencanaan-komunikasi-dinas-komunikasi-informatika-statistik-dan-persandian-kot>.

² Yasraf A. Piliang, *Transfolitika, Dinamika Politik Di Dalam Era Virtualitas* (Yogyakarta: KDT, n.d.).

³ Nurani Soyomuki, *Komunikasi Politik* (Malang: Penerbit, Intrans Publising, 2013).

⁴ Tanius Sebastian, "Kesesatan Berpikir Dalam Konteks Hukum Dan Masyarakat: Studi Kasus Politik Elektoral Dan Budaya Media Sosial Di Indonesia," *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 9, no. 3 (2019): 311, <https://doi.org/10.17510/paradigma.v9i3.239>.

⁵ Khoiruddin Muchtar, "Komunikasi Politik Dan Pembentukan Citra Partai," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (2016): 136, <https://doi.org/10.31315/jik.v14i2.2127>.

tergambar kewenangan pemerintah untuk mengatur dan memakas. Kewenangan tersebut terlihat dari adanya sanksi atau denda untuk sebuah ketidaktatan pada mekanisme. Namun di negara ini politik berkembang yang begitu pesat tidak bisa terlepas dari dua klasifikasi yaitu: politik Kartel merupakan politik yang menopang pemerintah untuk melakukan koalisi, sedangkan politik Oportunistik merupakan politik lewat bagi-bagi kursi atau kekuasaan. Peran lembaga politik yang semestinya untuk mewujudkan dan kesejahteraan masyarakat, tersandara oleh kepentingan-kepentingan yang terselubung yang bergelut di dunia perpolitikan.⁶ Bayangkan sebuah dunia politik, yang di dalamnya tidak ada ruang publik, melainkan ruang digital politik, tidak ada kebenaran politik melainkan manipulasi politik, tidak ada realitas politik melainkan fatamorgana politik, tidak ada kebijakan politik melainkan permainan bebas politik, tidak ada transendensi politik melainkan imanensi politik inilah dunia politik.⁷

Setidak-tidaknya isu utama yang mengemuka di dalam wacana pemikiran politik, dewasa ini sebagai akibat dari berbagai perubahan yang disebabkan dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir beserta berbagai efek sosial kemanusiaan yang di timbulkannya. Perkembangan yang disebut abad informasi, abad citra atau abad virtual akhir-akhir ini telah memengaruhi bagaimana politik itu di pandang. Tiga isu sentral politik di dalam abad informasi ini adalah: Pertama, geopolitik yaitu terjadinya perubahan mendasar tentang fungsi atau wilayah tritorial, khususnya bagaimana politik dipandang di dalam dunia yang tanpa sekat dan di dalam era transparansi yang di ciptakan oleh abad informasi dan globalisasi. Pemahaman tentang politik, dalam pengertiannya yang paling luas, kini sudah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keberadaan tempat, wilayah, atau tritorial sebagai suatu kesatur utuh dan menjadi prasyarat politik. Kedua, politik ruang yaitu apa yang di dalam teori-teori politik secara tradisional disebut ruang publik kini mengalami berbagai transformasi mendasar, sebagai akibat dari perkembangan ruang-ruang maya yang diciptakan dalam jaringan teknologi informasi. Di dalam ruang informasi tersebut, ruang publik fisik diambil alih dan di ubah ke arah ruang publik virtual.⁸

Perkembangan teknologi informasi mutakhir telah menciptakan pergeseran atau imigrasi masyarakat politik dari ruang publik fisik ke dalam ruang publik virtual, yang di dalamnya berbagai aktivitas politik kini dilakukan secara virtual. Ketiga, persoalan politik waktu yaitu bagaimana tempo kehidupan di dalam masyarakat informasi yang di picu oleh berbagai bentuk teknologi informasi, yang telah menggiring berbagai aktivitas politik ke dalam tempo kecepatan dan percepatan yang tinggi, yang didalamnya tahap tertentu berpengaruh pada esensi politik itu sendiri. Di dunia politik yang dibangun oleh tempo yang cepat tersebut, kekuasaan politik tidak dapat lagi dibangun dalam bentuk kekuasaan tritorial itu sendiri, akan tetapi lebih jauh lagi kekuasaan atas kecepatan, beserta pengetahuan yang membangun.

⁶ Lukas S. Ispandriarno, *Media Dan Politik, Siakp Pers Terhadap Pemerintahan Koalisi Di Indonesia* (Jakarta: IKAPI DKI Jakarta, 2014), hlm.8 .

⁷ Nurannafi FSM, "Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Di Kota Majalengka," *InterKomunika* 3, no. 1 (2018): 14, <https://doi.org/10.33376/ik.v3i1.147>.

⁸ Nuruddin, "Teori Agenda Setting Dalam Ilmu Komunikasi," *Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2007): 37, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/symbolika/article/view/1460>.

Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan memiliki akar filosofis yang kuat dalam tradisi pos-positivisme, yakni suatu pendekatan yang tidak lagi memandang realitas sebagai sesuatu yang sepenuhnya objektif dan tunggal, melainkan sebagai konstruksi yang dapat dipahami melalui interpretasi yang mendalam dan kritis.⁹ Dalam kerangka ini, penelitian kepustakaan tidak sekadar mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis, tetapi berupaya menafsirkan, mengkonstruksi, dan bahkan mengkritisi pengetahuan yang telah ada. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan dapat digolongkan sebagai bagian dari penelitian kualitatif, karena menekankan pada pemaknaan, pemahaman kontekstual, serta analisis yang bersifat interpretatif. Sebagai bagian dari studi tokoh, penelitian kepustakaan menempati posisi yang sangat penting dalam spektrum penelitian kualitatif, bahkan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penelitian pada tingkat tertinggi. Hal ini disebabkan karena penelitian kepustakaan tidak hanya berurusan dengan data empiris yang tampak, tetapi juga menyentuh dimensi konseptual, filosofis, dan historis dari suatu pemikiran.

Peneliti dituntut untuk mampu membaca secara mendalam, memahami konteks lahirnya suatu gagasan, serta mengaitkannya dengan perkembangan wacana keilmuan yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian kepustakaan menjadi ruang dialektika antara teks, konteks, dan interpretasi peneliti. Dalam praktiknya, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengeksplorasi berbagai sumber pustaka secara holistik, baik berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen, maupun karya-karya klasik yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini tidak berhenti pada tahap pengumpulan data, tetapi dilanjutkan dengan analisis yang didasarkan pada kerangka berpikir filosofis yang jelas. Peneliti harus mampu mengorganisasikan data secara sistematis, mengidentifikasi pola-pola pemikiran, serta membangun argumen yang koheren dan logis. Di sinilah letak keunggulan penelitian kepustakaan, yaitu kemampuannya untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap suatu fenomena atau konsep. Lebih jauh lagi, studi kepustakaan berfungsi sebagai fondasi utama dalam membangun landasan teori dan kerangka berpikir penelitian.¹⁰

Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menelusuri berbagai teori yang telah dikembangkan sebelumnya, memahami posisi penelitiannya dalam peta keilmuan, serta mengidentifikasi celah atau kekosongan penelitian yang dapat dijadikan fokus kajian. Dengan kata lain, studi kepustakaan membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian, menyusun hipotesis atau dugaan sementara, serta menentukan arah dan metode penelitian yang akan digunakan. Tidak hanya itu, penelitian kepustakaan juga memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan kapasitas intelektual peneliti. Proses membaca, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber pustaka akan memperkaya wawasan dan memperluas perspektif berpikir. Peneliti dilatih untuk berpikir kritis, sistematis, dan reflektif, sehingga mampu melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Jika dilakukan secara teliti dan intensif,

⁹ Atika Septina et al., "Al-Qur'an Dan Urgensinya Dalam Kehidupan Manusia," *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini* 4, no. 3 (2023): 127–35, <https://doi.org/10.59059/tarim.v4i3.211>.

¹⁰ Muhamad Bisri Mustofa, Siti Wuryan, and Rosidi, "Urgensi Komunikasi Interpersonal Dalam Al-Qur'an Sebagai Pustakawan," *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 11, no. 2 (2020): 85–94, <https://doi.org/10.32505/hikmah.v11i2.2544>.

penelitian kepustakaan dapat membuka kemungkinan lahirnya gagasan-gagasan baru yang inovatif, bahkan mampu menghadirkan dimensi baru dalam kerangka berpikir keilmuan.¹¹

Hasil Dan Pembahasan

A. Pemanfaatan Media Online

Pemanfaatan media online pada era digital saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat modern. Kehadiran internet tidak hanya mengubah cara individu berkomunikasi, tetapi juga mentransformasi pola interaksi sosial, akses informasi, hingga praktik pendidikan dan keagamaan. Media online baik berupa website, blog, maupun platform seperti Instagram, YouTube, dan WhatsApp telah menjadi ruang baru yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung secara cepat, luas, dan interaktif. Dalam konteks pendidikan, pemanfaatan media online membuka peluang besar bagi terciptanya proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik untuk mengakses berbagai sumber belajar digital. Melalui platform seperti Google Classroom atau Zoom, proses pembelajaran dapat berlangsung tanpa batas ruang dan waktu.¹²

Hal ini memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri, kolaboratif, serta lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Lebih jauh lagi, media online juga berperan signifikan dalam membentuk opini publik dan konstruksi sosial. Informasi yang tersebar melalui media digital dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu isu, termasuk dalam bidang keagamaan. Dakwah, misalnya, kini tidak hanya dilakukan secara konvensional melalui mimbar, tetapi juga melalui konten digital seperti video ceramah, podcast, dan unggahan visual yang menarik. Fenomena ini menunjukkan bahwa media online tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga medium representasi identitas dan nilai-nilai tertentu. Namun demikian, pemanfaatan media online juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Arus informasi yang begitu cepat sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai.¹³

Hal ini berpotensi menimbulkan penyebaran hoaks, misinformasi, hingga polarisasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis dan selektif dalam mengonsumsi informasi, serta penguatan literasi digital sebagai bagian dari kompetensi dasar masyarakat modern. Pada akhirnya, pemanfaatan media online harus dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, ia menawarkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di sisi lain, ia menuntut kesiapan individu dan masyarakat untuk mengelolanya secara bijak, etis, dan bertanggung

¹¹ Fitri Nur Rohmah Dewi, "Konsep Diri Pada Masa Remaja Akhir Dalam Kematangan Karir Siswa," *KONSELING EDUKASI "Journal of Guidance and Counseling"* 5, no. 1 (2021): 46–62, <https://doi.org/10.21043/konseling.v5i1.9746>.

¹² Sirajul Fuad Zis, Rahmi Surya Dewi, and Zainal Efendi, "Model Perilaku Komunikasi Generasi Muda Dalam Pemanfaatan Media Digital Memasuki Era 4.0 Dan 5.0 Di Kecamatan Kuranji," *Jurnal Komunikasi Profesional* 5, no. 1 (2021): 66–87, <https://doi.org/10.25139/jkp.v5i1.3624>.

¹³ E Widayanti et al., "Pemanfaatan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran Dimasa Pandemi MI Nurul Huda Sukaraja," *Madrosatuna ...* 4, no. March 2020 (2021): 1–12, <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/madrosatuna/article/view/314>.

jawab. Dengan demikian, media online dapat benar-benar menjadi sarana yang produktif dalam mendukung pembangunan pengetahuan, karakter, dan peradaban yang lebih baik.¹⁴

B. Membangun Komunikasi Politik

Membangun komunikasi politik pada dasarnya bukan sekadar aktivitas menyampaikan pesan kekuasaan, melainkan proses kompleks yang melibatkan pertukaran makna antara aktor politik, masyarakat, dan berbagai institusi sosial. Dalam konteks ini, komunikasi politik menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan negara dengan aspirasi publik, sekaligus menjadi arena di mana legitimasi kekuasaan dibentuk, dipertahankan, atau bahkan dipertanyakan. Oleh karena itu, komunikasi politik tidak dapat dipahami hanya sebagai retorika elite, tetapi sebagai praktik sosial yang dinamis dan sarat dengan kepentingan, nilai, serta strategi. Secara konseptual, komunikasi politik berakar pada kajian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik yang saling beririsan. Dari perspektif ini, komunikasi politik mencakup berbagai aktivitas seperti kampanye, debat publik, propaganda, hingga manajemen citra. Tokoh-tokoh seperti Harold Lasswell menekankan bahwa komunikasi politik selalu berkaitan dengan pertanyaan mendasar: siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa. Kerangka ini menegaskan bahwa komunikasi politik bukan hanya tentang pesan, tetapi juga tentang kekuasaan yang terkandung di dalamnya.¹⁵

Dalam praktiknya, membangun komunikasi politik yang efektif membutuhkan strategi yang terencana dan kontekstual. Pesan politik harus dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik audiens, latar belakang budaya, serta dinamika sosial yang berkembang. Di sinilah pentingnya narasi politik yang tidak hanya informatif, tetapi juga persuasif dan emosional. Narasi yang kuat mampu membangun kedekatan psikologis antara aktor politik dan masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami, tetapi juga dirasakan dan diinternalisasi. Perkembangan teknologi digital semakin memperluas ruang komunikasi politik. Platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan TikTok telah mengubah pola komunikasi dari yang bersifat satu arah menjadi lebih interaktif dan partisipatif. Aktor politik kini dapat berkomunikasi secara langsung dengan publik tanpa melalui perantara media tradisional. Hal ini menciptakan peluang bagi terciptanya komunikasi yang lebih transparan dan responsif, tetapi juga menghadirkan tantangan baru seperti disinformasi, polarisasi, dan manipulasi opini publik. Dalam konteks masyarakat demokratis, komunikasi politik yang sehat harus didasarkan pada prinsip keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas.¹⁶

Komunikasi tidak boleh hanya menjadi alat untuk membangun citra semata, tetapi harus mencerminkan komitmen terhadap kepentingan publik. Di sinilah peran etika komunikasi menjadi sangat penting. Tanpa etika, komunikasi politik berpotensi berubah menjadi propaganda yang menyesatkan dan merusak tatanan demokrasi. Selain itu, membangun komunikasi politik juga berkaitan erat dengan kemampuan mendengarkan. Sering kali komunikasi politik dipahami secara sempit sebagai kemampuan berbicara atau menyampaikan pesan, padahal aspek mendengarkan

¹⁴ Dwi Sukma Donoriyanto et al., "Optimalisasi Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Online Store Pada Pelaku UMKM Di Kota X," *Jurnal Abdimas Peradaban* 4, no. 1 (2023): 42–50, <https://doi.org/10.54783/ap.v4i1.22>.

¹⁵ Laela Ratnasari and Agus Suradika, "Building an Islamic School's Reputation Among the Muslim Middle Class," *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis* 4, no. 1 (2020): 18.

¹⁶ Suardin Abd Rasyid et al., "Konstruksi Media Sosial Dalam Pembentukan Perilaku Konsumen Kecantikan (Studi Pada Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 8887–8901.

aspirasi masyarakat sama pentingnya. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan rakyat akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil. Di sisi lain, konteks lokal dan budaya tidak dapat diabaikan dalam membangun komunikasi politik. Setiap masyarakat memiliki nilai, norma, dan simbol yang berbeda, sehingga pendekatan komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik tersebut.¹⁷

Dalam masyarakat yang religius, misalnya, pesan politik yang mengandung nilai-nilai moral dan etika keagamaan cenderung lebih mudah diterima. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik bukanlah proses yang netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya yang melingkupinya. Pada akhirnya, membangun komunikasi politik yang efektif adalah tentang menciptakan keseimbangan antara strategi, etika, dan empati. Komunikasi yang baik bukan hanya mampu memengaruhi, tetapi juga mampu membangun kepercayaan dan partisipasi publik. Dalam jangka panjang, komunikasi politik yang sehat akan berkontribusi pada terciptanya sistem demokrasi yang inklusif, transparan, dan berkeadilan, di mana suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan.

C. Pemanfaatan Media Online Dalam Membangun Komunikasi Politik Di Nusa Tenggara Barat

Media massa memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, media massa hidup sebagai penyambung lidah bahkan jembatan informasi bagi masyarakat.¹⁸ Media massa pun menjadi sumber informasi yang dapat membentuk pandangan publik, selalu menyajikan beragam informasi yang aktual dan dikonsumsi masyarakat secara luas. Media menyajikan informasi atau berita yang mampu menyebabkan masyarakat menjadi percaya terhadap segala informasi yang disajikan. Informasi yang diterima oleh masyarakat belum tentu sepenuhnya atau secara lengkap diserap, sehingga akan menimbulkan distorsi pesan. Dengan terjadinya distorsi maupun disinformasi, maka akan dapat menghasilkan sikap yang salah. Sikap yang salah inilah yang nantinya akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Selain itu, media massa menyajikan informasi yang diolah sedemikian rupa agar menjadi berita hingga kemudian dapat membentuk dan menciptakan citra bagi suatu instansi maupun individu. Pertanyaan yang mendasar, apakah media menggambarkan dunia sebagaimana fakta dan peristiwa (keadaan dunia), berdasarkan pikiran manusia khalayak media, atau media menciptakan pemahaman sendiri atas dunia berdasarkan kecenderungan pemahaman organisasi dan pengelola media.¹⁹

Informasi sudah menjadi kebutuhan manusia yang esensial untuk mencapai tujuan. Melalui informasi manusia dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitarnya, memperluas cakrawala pengetahuannya, sekaligus memahami kedudukan serta prannya dalam masyarakat. Media massa, pada hakekatnya berupaya memotifasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam menyoroti

¹⁷ Rasyid et al.

¹⁸ Amrullah Amrullah, Umar Umar, and Lili Suharli, "Pengaruh Strategi Komunikasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dengan Perilaku Pemilih Sebagai Variabel Moderasi Dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Di Kota Sumbawa," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 5 (2023): 2922–30, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.1984>.

¹⁹ Mozaik Desa, Pematang Serai, and Langkat Perspektif, "Personal Branding Lalu Muhamad Iqbal Untuk Membangun Komunikasi Politik Di Media Sosial Instagram," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483–90, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/23381/13935>.

berbagai persoalan di masyarakat. pres menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Pres menjadi agen pembaruan dalam segala kompleksitasnya yang berorientasi pada kebenaran. Indonesia sebagai negara berkembang, perlu memformulasikan konsep aturan maen dari proses komunikasi dan informasi media massa. Dalam perkembangannya, pres di Indonesia banyak mengalami pasang surut serta tumpang tindih (*over lapping*), khususnya dari segi hukum yang mengatur pola hidup antara pers, pemerintah dan masyarakat. Media massa di Indonesia hendaknya jangan menganggap bahwa masyarakat adalah pasar yang potensial serta dapat dipolitisi sedemikian rupa hingga menjadikannya sebagai audien yang setia atau penurut. Karena itu, dalam menjalankan fungsinya, media massa harus mampu berdiri tetap di tengah (pers, masyarakat, dan pemerintah), mengingat masyarakat Indonesia sebagai *resources* yang sangat potensial dalam mengisi pembangunan.²⁰

Kemampuan media dalam menyampaikan penyiaran untuk menampilkan pesan kepada khalayak luas menjadikan media sebagai objek, media penyiaran merupakan organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa produk budaya atau pesan yang dapat mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat, seperti halnya aspek politik dan ekonomi. Media massa khususnya media penyiaran merupakan suatu sistem tersendiri yang merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang lebih luas. Media massa dalam kehidupan modern memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam konteks politik. Sebagai sumber informasi politik, media massa telah mengubah cara masyarakat memahami dan merespons dinamika kekuasaan.²¹ Pada masa sebelum berkembangnya media secara luas, masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengetahui aktivitas para wakil rakyat dan proses-proses politik yang berlangsung di tingkat lokal maupun nasional. Informasi politik cenderung bersifat tertutup dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan media massa, baik cetak maupun elektronik hingga digital, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi politik secara cepat, luas, dan mendalam. Media telah menjalankan fungsi pengawasan (*social control*) dengan membuka berbagai aktivitas politik yang sebelumnya tersembunyi, sehingga publik dapat mengetahui, menilai, bahkan mengkritisi jalannya pemerintahan.²²

Dalam kehidupan sehari-hari, hampir seluruh lapisan masyarakat memperoleh informasi politik melalui media massa. Baik masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan tidak dapat dilepaskan dari arus informasi yang terus mengalir melalui berbagai saluran media, mulai dari media lokal, regional, nasional, hingga internasional. Kondisi ini menjadikan media massa sebagai referensi utama dalam membentuk opini publik terkait isu-isu politik. Masyarakat menjadi lebih sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sekaligus lebih kritis dalam menyikapi kebijakan publik. Lebih jauh, media massa juga memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan politik. Fungsi pertama adalah sebagai penyedia informasi, di mana media menyajikan berbagai peristiwa politik, aktivitas aktor politik, serta dinamika

²⁰ Firdausi Nuzula, Muhammad Saleh, and Darmadi, "Front Stage Solidaritas Dan Back Stage Kontroversi : Analisis Dramaturgi Zulkifli Hasan Hadapi Tuduhan Pemicu Banjir Aceh 2025," *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara* 2, no. 1 (2026): 22–27, <https://ejournal.lembagarisetmandirinusantara.or.id/index.php/jrcn/article/view/52/76>.

²¹ Hannah Annisa and Fatma Ulfatun Najicha, "KONSEKUENSI GEOPOLITIK ATAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA," *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2021, <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5768>.

²² Fitria Santi, "Pesan Nonverbal Dalam Komunikasi Politik Wahidin Halim Sebagai Calon Gubernur Banten Pada Pilkada Banten 2017," *Nyimak (Journal of Communication)* 2, no. 2 (2018): 131–49, <https://doi.org/10.31000/nyimak.v2i2.960>.

kebijakan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Fungsi kedua adalah mendorong partisipasi masyarakat, di mana pemberitaan politik dapat membangkitkan kesadaran publik untuk terlibat dalam proses demokrasi, seperti memberikan dukungan terhadap kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum atau berpartisipasi dalam pemilihan umum. Fungsi ketiga adalah sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik, yaitu membantu masyarakat memahami sistem politik, nilai-nilai demokrasi, serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bernegara.²³

Selain itu, media massa juga memiliki fungsi politisasi, yaitu membentuk dan mengembangkan budaya politik masyarakat. Melalui berbagai sajian informasi dan opini, media dapat memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku politik masyarakat, sehingga pada akhirnya membentuk karakter politik suatu bangsa. Fungsi lainnya yang tidak kalah penting adalah sebagai alat integrasi bangsa. Dalam masyarakat yang majemuk, media massa berperan dalam menyatukan berbagai perbedaan, seperti etnis, budaya, dan latar belakang sosial, ke dalam satu kesadaran nasional. Media diharapkan mampu mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan, sehingga tidak memperuncing perbedaan, melainkan justru memperkuat kohesi sosial. Di sisi lain, media massa juga memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Melalui beragam sajian informasi, media memberikan pilihan dan referensi bagi publik dalam memahami isu-isu politik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengambil keputusan secara lebih rasional dan bertanggung jawab. Informasi yang disajikan secara beragam juga memperkaya wawasan masyarakat, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses politik. Kebebasan media massa menjadi aspek penting dalam menjalankan seluruh fungsi tersebut.²⁴

Setelah mengalami masa pembatasan yang cukup panjang, media kini memperoleh ruang kebebasan yang lebih luas untuk menyampaikan informasi secara terbuka, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, maupun hukum. Kebebasan ini memberikan kesempatan bagi publik dan elit politik untuk saling bertukar informasi serta melakukan kontrol sosial secara transparan. Dalam perspektif filosofis, kebebasan media massa merupakan bagian dari hakikatnya sebagai sarana komunikasi yang bertujuan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Media massa pada dasarnya adalah produk pemikiran manusia yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai realitas sosial dalam ruang dan waktu yang berbeda. Melalui media, manusia dapat membangun komunikasi lintas wilayah, budaya, dan peradaban. Oleh karena itu, kebebasan media menjadi kebutuhan yang mendasar, karena hanya dengan kebebasan tersebut media dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menyebarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kedamaian, dan keharmonisan. Dengan demikian, media massa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang demokratis, berkeadaban, dan harmonis.²⁵

²³ Dewi Ummi Raihanun, "Strategi Komunikasi Politik Nahdlatul Wathan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Dan 2018," *Potret Pemikiran* 26, no. 2 (2022): 150, <https://doi.org/10.30984/pp.v26i2.2048>.

²⁴ Nurliya Ni'matul Rohmah, "Lansia Menyikapi Misinformasi: Bentuk, Strategi Dan Upaya Penanggulangan Hoaks Dalam Konteks Pemilu 2024 Di Nusa Tenggara Barat," *Journal of Islamic Communication Studies (JICOs)* 2, no. 1 (2024): 20–32, <https://doi.org/10.15642/jicos.2024.2.1.20-32>.

²⁵ Indra Lestari, Iriyani Astuti Arief, and Muh.Djufri Rachim, "Partisipasi Politik Generasi Z Pada New Media Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2024," *Journal Publicubo* 7, no. 4 (2024): 2297–2308, <https://journalpublicubo.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/600>.

Dalam pandangan teoritis, kehadiran media massa sebagaimana dikemukakan oleh Rochajat berada pada wilayah *das sollen*, yaitu tataran ideal yang dicita-citakan. Dalam posisi ini, media massa diharapkan menjadi instrumen yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, objektivitas, serta memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Media idealnya berfungsi sebagai penyalur informasi yang jernih, mendidik masyarakat, serta menjadi pengontrol kekuasaan demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Namun, ketika media massa menjalankan peran dan fungsinya dalam realitas empiris atau *das sein*, tidak jarang terjadi pergeseran dari nilai-nilai ideal tersebut. Media dapat terjebak dalam kepentingan ekonomi, politik, atau ideologis tertentu, sehingga tidak sepenuhnya mampu mempertahankan idealitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara dunia ideal dan dunia nyata, di mana tidak selalu keduanya berjalan selaras. Fenomena tersebut juga tampak dalam praktik kampanye politik di Indonesia. Secara konseptual, kampanye merupakan aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi masyarakat agar memiliki wawasan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan gagasan atau program yang ditawarkan oleh kandidat atau partai politik. Kampanye seharusnya menjadi sarana edukatif dan persuasif yang mendorong masyarakat untuk memahami visi, misi, serta program kerja secara rasional.²⁶

Namun, dalam praktiknya, kampanye sering kali mengalami penyimpangan makna. Kampanye tidak jarang diwujudkan dalam bentuk pawai kendaraan bermotor, pertunjukan hiburan oleh artis, pidato yang penuh emosi, bahkan diwarnai dengan propaganda, agitasi, dan serangan terhadap lawan politik. Realitas ini menunjukkan bahwa praktik kampanye sering kali lebih menonjolkan aspek hiburan dan mobilisasi massa dibandingkan substansi pendidikan politik. Dalam konteks ini, konsep pemasaran politik menjadi relevan untuk memahami dinamika tersebut. Pemasaran politik merupakan adaptasi dari konsep pemasaran komersial yang diterapkan dalam dunia politik, dengan tujuan menyebarkan informasi tentang kandidat, partai, dan program kepada masyarakat. Berbeda dengan pemasaran komersial yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, pemasaran politik lebih menekankan pada perubahan wawasan, sikap, dan perilaku masyarakat agar mendukung ide atau kandidat tertentu. Dengan kata lain, pemasaran politik merupakan upaya strategis untuk membangun citra, meningkatkan elektabilitas, serta memengaruhi preferensi pemilih melalui berbagai saluran komunikasi.

Pelaksanaan pemasaran politik tidak dapat dilepaskan dari peran tim sukses, yaitu kelompok yang dibentuk secara khusus untuk merancang dan menjalankan strategi pemenangan. Tim sukses biasanya terdiri dari berbagai elemen yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Penasehat, misalnya, berperan dalam memberikan arahan strategis dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tim ahli bertugas menyusun program, merancang substansi kampanye, serta memberikan dukungan keilmuan kepada kandidat.²⁷ Sementara itu, tim riset dan pengembangan (litbang) berfungsi mengumpulkan dan menganalisis data terkait persepsi publik, peta politik, serta kebutuhan pemilih. Selain itu, terdapat pula tim pengumpulan data yang berperan dalam menyediakan informasi penting yang dibutuhkan dalam

²⁶ Abdur Kadir, Ahmad Usman, and Sadrul. Imam, "Eksaminasi Peran Media Lokal Dalam Komunikasi Politik Pilkada Serentak 2024: Studi Kasus Di Kota Bima," *JLAN: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 21, no. 2 (2024), <https://jurnal.universitassambojobima.ac.id/index.php/jian/article/view/262/376>.

²⁷ Philips Juniory Nyaleson Ndoda, Neneng Yani Yuningsih, and Yusa Djuyandi, "Kampanye Politik Victory-Jos Melalui Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018," *Al-Ijtima': International Journal of Government and Social Science* 5, no. 2 (2020): 149–60, <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.548>.

strategi kampanye, serta tim kampanye yang secara langsung merancang dan melaksanakan kegiatan kampanye di lapangan. Tim penggalangan massa memiliki tugas untuk mengorganisasi dukungan publik, baik dalam bentuk suara maupun kehadiran dalam berbagai kegiatan politik.²⁸

Tim hubungan antar daerah berfungsi menjaga koordinasi antara pusat dan daerah, sehingga strategi dapat berjalan secara terintegrasi. Tidak kalah penting, tim pengamat bertugas memantau pergerakan lawan politik dan mengidentifikasi potensi ancaman terhadap citra kandidat atau partai. Sementara itu, tim pengaman memberikan perlindungan kepada kandidat, terutama dalam situasi politik yang rawan. Terakhir, tim pengumpul suara terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat, seperti tokoh agama dan tokoh sosial, yang berperan dalam meyakinkan masyarakat untuk memberikan dukungan. Secara keseluruhan, dinamika media massa, kampanye, dan pemasaran politik menunjukkan adanya interaksi antara idealitas dan realitas dalam kehidupan politik. Di satu sisi, terdapat harapan besar agar proses komunikasi politik berjalan secara edukatif, rasional, dan bermartabat. Namun di sisi lain, praktik di lapangan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis yang menggeser nilai-nilai ideal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen dari seluruh aktor politik, termasuk media massa, untuk mengembalikan praktik komunikasi politik pada tujuan utamanya, yaitu mencerdaskan masyarakat dan memperkuat kualitas demokrasi.

Kesimpulan

Kondisi politik yang dibangun di dalam berbagi ruang virtual (*seperti cyberspace*), yang memengaruhi bentuk, penampakan, nilai, dan kebenaran politik itu sendiri. Media merupakan ruang untuk perbuatan pengaruh para elit politik, baik yang berada di dalam pemerintah maupun yang di luar pemerintah, berupaya mendapatkan akses yang lebih lama dan luas untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang politik, realitas politik, kebijakan dan lembaga pemerintah yang sedang berkuasa. Pemanfaatan media online telah membawa perubahan besar dalam praktik komunikasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB). Media sosial dan platform digital lainnya kini menjadi sarana utama bagi aktor politik untuk menyampaikan pesan, membangun citra, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Di NTB, penggunaan media online dalam konteks politik semakin meningkat seiring dengan akses internet yang semakin meluas dan meningkatnya partisipasi generasi muda dalam ruang digital. Media massa dan politik tidak bisa dipisahkan karena media sebagai saluran komunikasi politik yang sangat efektif. Media massa memainkan peran yang sangat penting dalam proses politik. Ia memiliki kemampuan untuk membuat orang cemerlang dalam karir politiknya. Selain media cetak dan media elektronik, seiring dengan bertambahnya pengguna internet saat ini, internet dapat dijadikan media kampanye yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, regulasi konten politik yang bijak, serta pemanfaatan media online secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, media online dapat menjadi sarana yang sehat dan efektif dalam mendukung demokrasi yang partisipatif, khususnya dalam konteks pembangunan politik di NTB.

Daftar Pustaka

Amrullah, Amrullah, Umar Umar, and Lili Suharli. "Pengaruh Strategi Komunikasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dengan Perilaku Pemilih Sebagai Variabel Moderasi Dalam

²⁸ Faisal Fadilla Noorikhshan et al., "Dinamika Internet, Media Sosial, Dan Politik Di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat," *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (2023): 95–109, <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131>.

- Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Di Kota Sumbawa.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 5 (2023): 2922–30. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.1984>.
- Annisa, Hannah, and Fatma Ulfatun Najicha. “KONSEKUENSI GEOPOLITIK ATAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA.” *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2021. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5768>.
- Desa, Mozaik, Pematang Serai, and Langkat Perspektif. “Personal Branding Lalu Muhammad Iqbal Untuk Membangun Komunikasi Politik Di Media Sosial Instagram.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483–90. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/23381/13935>.
- Dewi, Fitri Nur Rohmah. “Konsep Diri Pada Masa Remaja Akhir Dalam Kematangan Karir Siswa.” *KONSELING EDUKASI “Journal of Guidance and Counseling”* 5, no. 1 (2021): 46–62. <https://doi.org/10.21043/konseling.v5i1.9746>.
- Donoriyanto, Dwi Sukma, Rus Indiyanto, Naniek Ratni Juliardi A. R., and Yuliatin Ali Syamsiah. “Optimalisasi Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Online Store Pada Pelaku UMKM Di Kota X.” *Jurnal Abdimas Peradaban* 4, no. 1 (2023): 42–50. <https://doi.org/10.54783/ap.v4i1.22>.
- FSM, Nurannafi. “Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Di Kota Majalengka.” *InterKomunika* 3, no. 1 (2018): 14. <https://doi.org/10.33376/ik.v3i1.147>.
- Indra Lestari, Iriyani Astuti Arief, and Muh.Djufri Rachim. “Partisipasi Politik Generasi Z Pada New Media Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2024.” *Journal Publicubo* 7, no. 4 (2024): 2297–2308. <https://journalpublicubo.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/600>.
- Kadir, Abdur, Ahmad Usman, and Sadrul. Imam. “Eksaminasi Peran Media Lokal Dalam Komunikasi Politik Pilkada Serentak 2024: Studi Kasus Di Kota Bima.” *JLAN: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 21, no. 2 (2024). <https://jurnal.universitasmbojobima.ac.id/index.php/jlan/article/view/262/376>.
- Muchtar, Khoiruddin. “Komunikasi Politik Dan Pembentukan Citra Partai.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (2016): 136. <https://doi.org/10.31315/jik.v14i2.2127>.
- Mustofa, Muhammad Bisri, Siti Wuryan, and Rosidi. “Urgensi Komunikasi Interpersonal Dalam Al-Qur’an Sebagai Pustakawan.” *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 11, no. 2 (2020): 85–94. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v11i2.2544>.
- Ni’matul Rohmah, Nurliya. “Lansia Menyikapi Misinformasi: Bentuk, Strategi Dan Upaya Penanggulangan Hoaks Dalam Konteks Pemilu 2024 Di Nusa Tenggara Barat.” *Journal of Islamic Communication Studies (JICoS)* 2, no. 1 (2024): 20–32. <https://doi.org/10.15642/jicos.2024.2.1.20-32>.
- Noorikhshan, Faisal Fadilla, Hilal Ramdhani, Budi Chrismanto Sirait, and Nisa Khoerunisa. “Dinamika Internet, Media Sosial, Dan Politik Di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat.” *Journal of Political Issues* 5, no. 1 (2023): 95–109. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131>.
- Nuruddin. “Teori Agenda Setting Dalam Ilmu Komunikasi.” *Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2007): 37. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/symbolika/article/view/1460>.
- Nuzula, Firdausi, Muhammad Saleh, and Darmadi. “Front Stage Solidaritas Dan Back Stage Kontroversi: Analisis Dramaturgi Zulkifli Hasan Hadapi Tuduhan Pemicu Banjir Aceh 2025.” *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara* 2, no. 1 (2026): 22–27. <https://ejournal.lembagarisetmandirinusantara.or.id/index.php/jrcn/article/view/52/76>.
- Nyaleson Ndoda, Philips Juniory, Neneng Yani Yuningsih, and Yusa Djuyandi. “Kampanye Politik Victory-Jos Melalui Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.” *Al-Ijtima’i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 2 (2020): 149–

60. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.548>.
- Piliang, Yasraf A. *Transfolitika, Dinamika Politik Di Dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: KDT, n.d.
- Raihanun, Dewi Ummi. "Strategi Komunikasi Politik Nahdlatul Wathan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Dan 2018." *Potret Pemikiran* 26, no. 2 (2022): 150. <https://doi.org/10.30984/pp.v26i2.2048>.
- Rasyid, Suardin Abd, Surahman Cinu, Nanang Wijaya, Ahmad Sinala, Sudirman K Uja, and Andi Riskan. "Konstruksi Media Sosial Dalam Pembentukan Perilaku Konsumen Kecantikan (Studi Pada Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 8887–8901.
- Ratnasari, Laela, and Agus Suradika. "Building an Islamic School's Reputation Among the Muslim Middle Class." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis* 4, no. 1 (2020): 18.
- Santi, Fitri. "Pesan Nonverbal Dalam Komunikasi Politik Wahidin Halim Sebagai Calon Gubernur Banten Pada Pilkada Banten 2017." *Nyimak (Journal of Communication)* 2, no. 2 (2018): 131–49. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v2i2.960>.
- Sebastian, Tanius. "Kesesatan Berpikir Dalam Konteks Hukum Dan Masyarakat: Studi Kasus Politik Elektoral Dan Budaya Media Sosial Di Indonesia." *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 9, no. 3 (2019): 311. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v9i3.239>.
- Septina, Atika, Muyasaroh Muyasaroh, Dwi Noviani, and Destri Wulandari. "Al-Qur'an Dan Urgensinya Dalam Kehidupan Manusia." *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini* 4, no. 3 (2023): 127–35. <https://doi.org/10.59059/tarim.v4i3.211>.
- Soyomuki, Nurani. *Komunikasi Politik*. Malang: Penerbit, Intrans Publising, 2013.
- Volume, Jom Visip. "Key Word : Communication Planning, Socialization, Smart City" 4, no. 2 (2017): 1–13. <https://www.neliti.com/publications/199308/perencanaan-komunikasi-dinas-komunikasi-informatika-statistik-dan-persandian-kot>.
- Widayanti, E, E Tamala, P E Prasetya, and ... "Pemanfaatan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran Dimasa Pandemi MI Nurul Huda Sukaraja." *Madrosatuna ...* 4, no. March 2020 (2021): 1–12. <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/madrosatuna/article/view/314>.
- Zis, Sirajul Fuad, Rahmi Surya Dewi, and Zainal Efendi. "Model Perilaku Komunikasi Generasi Muda Dalam Pemanfaatan Media Digital Memasuki Era 4.0 Dan 5.0 Di Kecamatan Kuranji." *Jurnal Komunikasi Profesional* 5, no. 1 (2021): 66–87. <https://doi.org/10.25139/jkp.v5i1.3624>.